

RINGKASAN

Pada tahun 2019 dunia menghadapi bencana yang disebabkan oleh koronavirus varian SARS-CoV-2. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang memiliki kasus Covid-19. Pandemi mengakibatkan adanya pemberlakuan kebijakan untuk menekan persebaran virus Covid-19, yakni PPKM. Pembatasan mobilitas penduduk memberikan dampak yang cukup merugikan bagi para pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perspektif pedagang kaki lima terhadap penerapan PPKM di Kelurahan Sumber Kabupaten Cirebon. Perspektif tersebut dapat dilihat dari makna, motif perilaku dan motif tindakan pedagang kaki lima mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sumber Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan 5 informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Selain itu data yang dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini adalah bahwa pedagang kaki lima di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. PKL memberikan pemaknaan mengenai PPKM memiliki dampak yang negatif yang merugikan secara finansial yaitu berkurangnya omset, akibat dari pembatasan jam operasional, pelarangan menggunakan fasilitas seperti kursi dan meja makan, serta adanya rasa takut pembeli terjankit COVID-19. Sementara dampak positif yang dirasakan adalah menuntut pedagang berfikir kreatif, dan inovatif untuk memulai berdagang. Oleh sebab itu makna mempengaruhi motif perilaku dan tindakan pedagang kaki lima. Motif perilaku pedagang tidak menaati PPKM untuk menekan biaya produksi, dan adanya kelonggaran penjagaan dari satgas atau satpol PP di waktu tertentu. Dan motif pedagang yang menaati PPKM adalah untuk mendapatkan izin berdagang dan tuntutan peran sebagai ketua perkumpulan. Adapun strategi dan upaya yang merupakan tindakan pedagang kaki lima adalah meminjam modal kepada kerabat dan orang terdekat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, penggunaan media sosial sebagai alat promosi, merubah barang dagang yang diperjual belikan, mencari pekerjaan sampingan, petak umpet dengan satgas dan satpol PP, serta membentuk perkumpulan pedagang.

Pemaknaan PPKM dari pedagang kaki lima, berakibat pada perilaku, dan tindakan yang muncul, merupakan respon dari implementasi kebijakan PPKM, seharusnya perlu dikaji guna mengetahui dampak yang ditimbulkan. Maka dari itu rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, perlu adanya pendalaman terkait perspektif pedagang kaki lima pasca penerapan kebijakan PPKM. Guna memperkaya kajian keilmuan sosiologi perkotaan terkait kajian tentang kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Selain itu penelitian ini menjadi rekomendasi informasi untuk pemerintah sebagai kajian dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

SUMMARY

In 2019 the world faced a disaster caused by the coronavirus variant SARS-CoV-2. On March 2, 2020 Indonesia was declared as one of the countries with Covid-19 cases. The pandemic resulted in the implementation of a policy to suppress the spread of the Covid-19 virus, namely PPKM. Restrictions on population mobility have a detrimental impact on street vendors in Cirebon Regency. Therefore, this study is to describe the perspective of street vendors on the implementation of PPKM in Sumber Village, Cirebon Regency. The perspective can be seen from the meaning, behavioral motives and action motives of street vendors regarding the policy of enforcing restrictions on community activities (PPKM) in Sumber Village, Cirebon Regency.

This research uses a descriptive qualitative approach method with 5 informants determined by purposive sampling technique. In addition, the data collected using in-depth interviews, observations, and documentation. This research is that street vendors in Sumber District, Cirebon Regency. Street vendors interpret PPKM as having a negative impact that is financially detrimental, namely reduced turnover, due to restrictions on operating hours, prohibitions on using facilities such as dining chairs and tables, and the fear of buyers contracting COVID-19. While the positive impact felt is that it requires traders to think creatively and innovatively to start trading. Therefore, meaning affects the behavioral motives and actions of street vendors. The motive for the behavior of traders not to obey PPKM is to reduce production costs, and there is leniency in guarding from the task force or Satpol PP at certain times. And the motive of traders who obey PPKM is to get a trading license and the demands of the role as chairman of the association. The strategies and efforts that are the actions of street vendors are borrowing capital from relatives and closest people, moving from one place to another, using social media as a promotional tool, changing the trade goods being traded, looking for side jobs, hide and seek with the task force and Satpol PP, and forming a trader association.

The meaning of PPKM from street vendors, resulting in behavior and actions that arise, is a response to the implementation of PPKM policies, which should be studied to determine the impact caused. Therefore, the recommendation for further research is that there needs to be a deepening of the perspective of street vendors after the implementation of the PPKM policy. In order to enrich the scientific study of urban sociology related to the study of government policies given to street vendors. In addition, this research is a recommendation for information for the government as a study in implementing policies related to street vendors.